



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 4 Tahun 2023 Page 951-964

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten Dan Kota Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2017-2021

Galih Putranto

Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Mulia Singkawang

Email: galihpoetranto@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap Belanja Modal baik secara parsial dan simultan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Objek dalam penelitian ini adalah Pemerintah Daerah Kabupaten dan kota Provinsi Kalimantan Barat. Penelitian ini menggunakan sampel 14 kabupaten dan kota yang bersumber dari Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang telah di audit dari tahun 2017-2021 yang diperoleh dari BPK RI. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda dengan pengujian hipotesis menggunakan Uji t dan Uji f serta koefisien determinasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) secara parsial serta simultan berpengaruh terhadap belanja modal.

Kata Kunci : *Belanja Modal, Dana Alokasi Umum (DAU), Pendaparan Asli Daerah (PAD)*

Abstract

This research aimed to determine whether the Original Local Government Revenue (PAD) and General Allocation Fund (DAU) partially and simultaneously affect Capital Expenditures. The research method used in this research was quantitative research. The objects in this research were the District and City Government of West Kalimantan Province. This research used 14 samples of districts and cities sourced from the audited Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD) Realization Report from 2017-2021 obtained from BPK RI. The data analysis technique used was multiple linear regressions with hypothesis testing using the t-test, f-test, and coefficient of determination. The results of this research

showed that the Original Local Government Revenue (PAD) and General Allocation Fund (DAU) both partially and simultaneously affect Capital Expenditures.

Keyword: *Capital expenditure, General Allocation Fund (DAU), Original Local Government Revenue (PAD)*.

PENDAHULUAN

Sejak diberlakukannya Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah diberi kebebasan dan kewenangan secara luas untuk menggunakan dan mengelola berbagai sumber daya dan potensi daerah yang dimilikinya sesuai dengan kebutuhan dan digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya kebijakan otonomi daerah maka diharapkan pemerintah daerah dapat lebih mandiri serta dapat meningkatkan kualitas publik (Sulistiyawati & Purwanti, 2021).

Kebijakan pelaksanaan desentralisasi fiskal dilihat dari sisi keuangan negara telah menimbulkan implikasi yang mendasar dalam peta pengelolaan fiskal, desentralisasi fiskal adalah penyerahan kewenangan fiskal dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Artinya dengan adanya desentralisasi fiskal Pemerintah Daerah diharapkan mampu mengoptimalkan sumber daya dan potensi daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengotimalan tersebut harus secara tegas dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam hal ini berupa anggaran belanja modal (Sulistiyawati & Purwanti, 2021).

Provinsi Kalimantan Barat merupakan salah satu provinsi yang ada di Indonesia yang menjalankan otonomi daerah, Luas wilayah Kalimantan Barat sebesar 147.307 km² atau 1,13 kali luas Pulau Jawa dan termasuk Provinsi terbesar ketiga setelah Provinsi Papua (319.036,05 km²) dan Kalimantan Tengah (153.564,50 km²), sedangkan keempat adalah Kalimantan Timur (129.873 km² setelah dikurangi Provinsi Kalimantan Utara). Secara administratif wilayah Provinsi Kalimantan Barat beribu kota di Pontianak yang terdiri dari 14 (empat belas) wilayah kabupaten dan kota kira-kira 1,13 kali luas Pulau Jawa, Yang mempunyai Bagian Barat berbatasan dengan Selat Karimata, Bagian Utara berbatasan langsung dengan Sarawak (Malaysia Timur) dan Provinsi Kalimantan Timur. Bagian Selatan berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Tengah serta Laut Jawa. Bagian Timur berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur.

Dalam menjalankan pemerintahannya, pemerintah Provinsi Kalimantan Barat harus mampu mengoptimalkan sumber daya dan potensi daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan terus dilakukan oleh Pemerintah Provinsi

Kalimantan Barat demi mendorong kemajuan ekonomi, salah satunya dengan melakukan pembangunan dan perbaikan berbagai sarana dan prasarana infrastruktur di wilayah Kalimantan Barat. Untuk membiayai pembangunan tersebut maka diperlukan anggaran belanja modal yang besar, maka pemerintah Provinsi Kalimantan Barat diharapkan dapat mengalokasikan anggaran belanja modal dalam APBD sesuai dengan kebutuhan dalam membangun sarana dan prasarana infrastruktur.

Belanja Modal adalah belanja yang termasuk ke dalam komponen belanja langsung dalam daftar anggaran yang dibuat oleh pemerintah yang menyebabkan aset tetap yang dimiliki oleh pemerintah bertambah jumlahnya. Belanja modal yang dilakukan pemerintah daerah didasarkan pada kebutuhan daerah seperti sarana dan prasarana, baik untuk fasilitas publik maupun kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah (Fahrezi et al., 2021). Belanja modal seperti pembangunan infrastruktur sangat penting untuk memajukan perekonomian di daerah. Karena dengan adanya proyek pembangunan infrastruktur dapat menarik investor dalam jumlah yang cukup banyak. Investor akan menanamkan modal mereka dengan membiayai proyek infrastruktur tersebut. Sedangkan masyarakat di daerah tersebut tetap diuntungkan yaitu terbukanya beberapa lapangan kerja sehingga jumlah pengangguran di daerah tersebut menjadi berkurang. Semakin banyak masyarakat yang bekerja di daerah tersebut semakin menambah geliat pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut sehingga akan berakibat kepada pendapatan daerah yang meningkat.

Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah, kabupaten/kota karena keberhasilan mereka dalam mengembangkan potensi-potensi yang berada dalam daerah, kabupaten/kota yang mereka pimpin. Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Pasal 31 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (2019) menjelaskan pendapatan asli daerah meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Jumlah pendapatan asli daerah yang dihasilkan masing-masing daerah, kabupaten/kota berbeda-beda. pendapatan asli daerah yang kecil disebabkan oleh kemampuan yang dimiliki oleh daerah, kabupaten/kota tersebut dalam mengembangkan segala sumber penghasilan daerah mereka masih kecil. Oleh karena itu, perlu adanya bantuan dana dari pemerintah pusat guna membantu kabupaten/kota yang mana jumlah pendapatan asli daerah mereka masih kecil. Salah satu dana bantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat yaitu Dana Alokasi Umum (DAU).

Dana Alokasi Umum yang disebut dengan DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi

(Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Pasal 37 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, 2019). Dana tersebut diberikan dengan tujuan untuk melakukan pemerataan kemampuan fiskal di masing-masing daerah. Tidak semua daerah memiliki kemampuan fiskal yang sama dan kuat. Dana alokasi umum yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah berasal dari pendapatan APBN yang tujuan dana tersebut diberikan adalah supaya pemerintah daerah mengelola dana tersebut untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat atau publik. Tujuan diberikannya Dana Alokasi Umum oleh pemerintah pusat yaitu untuk mengurangi ketidakseimbangan horizontal (horizontal imbalance) antar pemerintah daerah (Fahrezi et al., 2021). Setelah mengetahui pentingnya belanja modal bagi program pembangunan daerah, penulis hendak meneliti besarnya pengaruh yang ditimbulkan oleh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum terhadap belanja modal pada kabupaten dan kota Kalimantan Barat tahun 2017-2021.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang bisa dihitung jumlahnya. Menurut Sujarweni (2015:12) Penelitian kuantitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang dapat dicapai dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara-cara lain dari kuantifikasi (pengukuran).

Objek dan Populasi dalam penelitian ini adalah 14 Kabupaten dan Kota di Provinsi Kalimantan Barat. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif berupa Laporan Realisasi Anggaran pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat tahun 2017-2021. Data diperoleh dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia di website e-ppid.bpk.go.id. Teknik sampling yang digunakan adalah full sampling yaitu semua populasi digunakan sebagai sampel. Berikut jumlah sampel yang digunakan, sebagai berikut:

Tabel 1. Populasi dan Sampel Penelitian

Keterangan	Jumlah
Jumlah Kabupaten dan Kota yang ada di provinsi Kalimantan Barat	14
Periode penelitian (2017-2021)	5
Jumlah sampel Penelitian	70

Penelitian ini menggunakan analisis statistik deskriptif dan regresi linier berganda. Sebelumnya akan dilakukan uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolonieritas, uji heterokedastisitas dan uji autokorelasi setelah itu melakukan pengujian hipotesis dengan melakukan uji koefisien determinasi, uji F dan uji t.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk mengetahui gambaran atau penyebaran data sampel atau populasi dalam penelitian. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendapatan asli daerah (PAD) dan dana alokasi umum (DAU) sebagai variabel independent dan belanja modal sebagai variabel dependent.

Tabel 2. Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X1	70	27205096648.63	478790894895.4 9	134384670077.4 619	103480528739.12138
X2	70	444906629000.0 0	1149675156000.0 0	702587002571.4 285	189945167740.10855
Y	70	121349991980.37	696363343014.12	283423987977.3 902	119710958331.16386
Valid N (listwise)	70				

Sumber: Data Olahan SPSS 25 (2023)

Analisis deskriptif dari data yang diambil adalah PAD, DAU dan belanja modal setiap kabupaten kota di Kalimantan Barat dari tahun 2017-2021.

a. Pendapatan asli daerah (PAD)

Rata-rata pendapatan asli daerah kabupaten kota di Kalimantan Barat sebesar Rp.134.3846 Miliar, dimana PAD terbesar sebesar Rp.478.7908 Miliar di kota Pontianak pada tahun 2019 dan PAD terkecil sebesar Rp.27.2050 Miliar di kabupaten Kayong Utara tahun 2018.

b. Dana alokasi umum (DAU)

Rata-rata dana alokasi umum kabupaten kota di Kalimantan Barat sebesar Rp.702.5870 Miliar, dimana DAU terbesar sebesar Rp.1149.6751 Miliar di kabupaten Ketapang pada tahun 2019 dan DAU terkecil sebesar Rp.444.9066 Miliar di kabupaten Kayong Utara tahun 2021.

c. Belanja Modal

Rata-rata belanja modal kabupaten kota di Kalimantan Barat sebesar Rp.283.4239

Miliar, dimana belanja modal terbesar sebesar Rp.696.3633 Miliar di kabupaten Ketapang pada tahun 2019 dan belanja modal terkecil sebesar Rp.121.3499 Miliar di kabupaten Bengkayang tahun 2020.

2. Uji Asumsi Klasik

Sesuai dengan tujuan penelitian yang akan dilaksanakan, yaitu untuk mengetahui bagaimana Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap belanja modal maka sebelum dilakukan analisis data dan pengujian hipotesis maka terlebih dahulu akan dilakukan pengujian terhadap asumsi-asumsi dalam analisis regresi yaitu pengujian asumsi klasik yang meliputi:

a) Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi yang digunakan berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas dalam penelitian ini dilakukan melalui metode statistik. Metode statistik menggunakan kolmogorov smirnov yang bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi memenuhi asumsi normalitas atau tidak. Jika nilai probabilitas $> 0,05$ maka nilai regresi memenuhi asumsi normalitas.

Tabel 3. Hasil Uji Kolmogorov Smirnov

Tests of Normality					
Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
.104	70	.056	.959	70	.023

Sumber: Data Olahan SPSS 25 (2023)

Dari tabel 2 diperoleh nilai Kolmogorov Smirnov sebesar 0.104 dengan p-value sebesar 0.056, dimana nilai p-value tersebut berada lebih besar dari 0.05 yang artinya data asumsi normalitas terpenuhi.

b) Uji Heterokedastisitas

Uji heteroskedastisitas merupakan uji yang dilakukan untuk mengetahui apakah model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika varian dari satu pengamatan ke pengamatan lain tetap disebut homoskedastisitas dan jika berbeda maka disebut heteroskedastisitas. Model yang baik adalah model yang tidak mengalami heterokedastisitas atau nilai probabilitas signifikansi di atas 0.05. Berikut adalah hasil uji glejser sebagai uji untuk mengetahui asumsi heteroskedastisitas.

Tabel 4. Hasil Uji Heterokedastisitas

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	86056719211924 80000000.000	2	4302835960596 240000000.000	2.113	.129 ^b
Residual	13646797174694 6820000000.000	67	20368353992081 61500000.000		
Total	14507364366813 9300000000.000	69			

a. Dependent Variable: absRes

b. Predictors: (Constant), X2, X1

Sumber: Data Olahan SPSS 25 (2023)

Dari hasil diatas dapat dilihat bahwa nilai F hitung sebesar 2.113 dimana p-value dari uji F sebesar 0.129, nilai tersebut lebih besar dari 5% (0.05) dengan begitu maka dapat disimpulkan bahwa data tidak mengalami heteroskedastisitas.

c) Uji Multikolinieritas

Uji Multikolinieritas dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas atau tidak. Dalam hal ini model yang baik adalah model yang tidak terjadi multikolinieritas.

Tabel 5. Uji Multikolinieritas

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	-38562303903.606	32443555362.075		-1.189	.239		
X1	.465	.087	.402	5.343	.000	.885	1.130
X2	.369	.047	.586	7.793	.000	.885	1.130

a. Dependent Variable: Y

Sumber: Data Olahan SPSS, 2023

Suatu model dapat regresi dapat dinyatakan bebas dari multikolinieritas jika mempunyai nilai VIF jauh dibawah angka 10 . Dari Tabel diatas diperoleh bahwa kedua variabel independent memiliki nilai VIF jauh dibawah angka 10. Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa tidak ada gejala multikoleniaritas dalam model regresi yang digunakan.

d) Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi linier terdapat korelasi atau hubungan yang kuat baik itu hubungan positif maupun negative antara kesalahan pengganggu (error) pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Dalam penelitian ini menggunakan uji Durbin Watson (DW test) untuk mengujinya.

Tabel 6. Uji Autokorelasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.815 ^a	.665	.655	70362325047.25 500	1.463

a. Predictors: (Constant), X2, X1

b. Dependent Variable: Y

Diperoleh nilai DW 1.463, nilai tersebut berada diantara -2 dan +2 sedemikian sehingga dinyatakan tidak terjadi pelanggaran asumsi autokorelasi.

3. Analisis Regresi Berganda

Regresi linier berganda merupakan alat statistik untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Regresi linier berganda ini dilakukan untuk melihat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

Tabel 7. Regresi Berganda

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF

1 (Constant)	-38562303903.606	32443555362.075		-1.189	.239		
X1	.465	.087	.402	5.343	.000	.885	1.130
X2	.369	.047	.586	7.793	.000	.885	1.130

a. Dependent Variable: Y

Berdasarkan hasil regresi di atas, maka dapat diperoleh suatu persamaan garis regresi sebagai berikut:

$$BM = -3.8560 + 0.465 X1 + 0.369 X2 + e$$

- Konstanta sebesar -3.8560 menyatakan bahwa jika variabel X konstan atau tidak dilibatkan dalam penelitian, maka variabel belanja modal akan konstan menurun sebesar Rp.3.8560 Miliar.
- Koefisien regresi X1 atau PAD sebesar 0.465 menyatakan bahwa setiap kenaikan Rp 1 Miliar pendapatan asli daerah maka akan meningkatkan belanja modal sebesar Rp.0.465 Miliar atau Rp 465.000.000, dengan asumsi variabel bebas lain besarnya konstan.
- Koefisien regresi X2 atau DAU sebesar 0.369 menyatakan bahwa setiap kenaikan Rp 1 Miliar dana alokasi umum maka akan meningkatkan belanja modal sebesar Rp.0.369 Miliar atau Rp 369.000.000, dengan asumsi variabel bebas lain besarnya konstan.

4. Uji T (Uji Parsial)

Pengujian hipotesis penelitian ini dilakukan dengan melakukan uji t. Uji t dilakukan untuk menguji seberapa jauh variabel independen yaitu PAD dan DAU secara parsial berpengaruh signifikan atau tidak signifikan terhadap belanja modal. Selain itu Uji t juga untuk menguji signifikansi konstanta dari setiap variabel untuk pengambilan keputusan hipotesis akan diterima atau ditolak. Apabila p-value < 0.05 maka terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen, namun sebaliknya apabila p-value > 0.05 maka tidak adanya pengaruh yang signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen.

Tabel 8. Uji T (Uji Parsial)

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	-38562303903.606	32443555362.075		-1.189	.239		
X1	.465	.087	.402	5.343	.000	.885	1.130

X2	.369	.047	.586	7.793	.000	.885	1.130
----	------	------	------	-------	------	------	-------

a. Dependent Variable: Y

Sumber: Data Olahan SPSS 2023

Pengujian ini digunakan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen.

- Hipotesis pertama (H1) pengaruh PAD terhadap belanja modal menghasilkan nilai signifikansi $0.000 < 0,05$ dengan nilai t-statistic sebesar 5.343. Hal ini berarti PAD berpengaruh secara signifikan terhadap belanja modal.
- Hipotesis kedua (H2) pengaruh DAU terhadap belanja modal menghasilkan nilai signifikansi $0.000 < 0,05$ dengan nilai t-statistic sebesar 7.793. Hal ini berarti DAU berpengaruh secara signifikan terhadap belanja modal

5. Uji F

Uji statistik F merupakan uji simultan atau uji serentak keseluruhan variabel independent terhadap variabel dependent. Dikatakan terdapat pengaruh secara bersama-sama antar variabel independen terhadap variabel dependen apabila p-value < 0.05 , dan sebaliknya.

Tabel 9. Uji F

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	65711182990930	2	32855591495465	66.363	.000 ^b
		6800000000.000		3400000000.000		
	Residual	33170740466572	67	49508567860555		
		3160000000.000		69000000.000		
	Total	98881923457503	69			
		0000000000.000				

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X2, X1

Sumber: Data Olahan SPSS 2023

Dari tabel hasil yang diperoleh dari uji F menunjukkan p-value sebesar 0.000 yang mana hal ini berarti nilai tersebut lebih kecil dari 5% atau 0.05. Menurut hasil tersebut maka dapat dikatakan bahwa variabel independen yaitu PAD dan DAU secara bersama

sama mempengaruhi variabel dependen yaitu belanja modal

6. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) yaitu digunakan untuk mengukur seberapa kuat kemampuan model regresi dalam menerangkan variasi variabel dependennya. Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 sampai dengan 1. Semakin kecil R^2 berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependennya amat terbatas.

Tabel 10. Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.815 ^a	.665	.655	70362325047.25 500	1.463

a. Predictors: (Constant), X2, X1

b. Dependent Variable: Y

Koefisien determinasi (R^2) dilakukan untuk melihat seberapa jauh sambungan variabel independent dalam menjelaskan secara keseluruhan terhadap variabel dependen. Dari hasil olah data di atas diketahui bahwa nilai R^2 sebesar 0.665 atau dengan kata lain bisa dijelaskan bahwa variabel dependen belanja modal dipengaruhi secara Bersama-sama oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar 66.5%, dimana 33.5% selebihnya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dilibatkan dalam penelitian ini.

7. Pembahasan

a) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal

Terlihat bahwa Hipotesis pertama (H_1) pengaruh PAD terhadap belanja modal menghasilkan nilai signifikansi $0.000 < 0,05$ dengan nilai t-statistic sebesar 5.343. Hal ini berarti Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh secara signifikan terhadap belanja modal. Hal itu disebabkan jika Pendapatan Asli Daerah (PAD) semakin besar pertumbuhannya maka belanja modal yang dilakukan Pemerintah Kabupaten dan Kota semakin baik dan mengarah pada investasi pembangunan infrastruktur publik yang kelak berdampak pada peningkatan pertumbuhan

ekonomi dan adanya Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk meningkatkan nilai aset daerah supaya pemerintah Kabupaten dan Kota tidak bergantung terus menerus kepada dana bantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Agustian et al. (2020) dan Fahrezi et al. (2021) menjelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap belanja modal dan merupakan sumber pendapatan daerah yang digunakan untuk membiayai belanja modal

b) Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Modal

Terlihat bahwa Hipotesis kedua (H2) pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) menghasilkan nilai signifikansi $0.000 < 0,05$ dengan nilai t-statistic sebesar 7.793. Hal ini berarti DAU berpengaruh secara signifikan terhadap belanja modal. Hal ini berarti dengan adanya dana alokasi umum yang diterima pemerintah daerah besar maka alokasi untuk belanja modal di daerah juga akan semakin besar dan adanya dana alokasi umum dapat dialokasikan sebagiannya untuk belanja modal supaya pendapatan daerah yang diterima semakin besar jumlahnya. Meskipun besaran Dana Alokasi Umum yang diterima masing-masing daerah cenderung berbeda, pemerintah daerah dapat menyesuaikan jumlah belanja modal yang akan dialokasikan (Fahrezi et al., 2021). Hasil penelitian ini sesuai dengan peneliti Suryana (2018) dan Fahrezi et al. (2021) yang menjelaskan bahwa Dana alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap Belanja Modal.

c) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Modal

Terlihat bahwa Hipotesis ketiga (H3) pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Modal yang diperoleh dari uji F menunjukkan p-value sebesar 0.000 yang mana hal ini berarti nilai tersebut lebih kecil dari 5% atau 0.05. Menurut hasil tersebut maka dapat dikatakan bahwa variabel independen yaitu PAD dan DAU secara bersama sama mempengaruhi variabel dependen yaitu belanja modal. Hal ini dikarenakan bahwa Pendapatan asli daerah dan Dana Alokasi Umum semakin besar sebagai sumber penerimaan daerah maka semakin besar pula dana yang dikeluarkan untuk belanja modal . hal ini disebabkan untuk membiayai penyediaan kebutuhan publik sebagai salah satu unsur yang mendorong perubahan kualitas pemerintah daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka peran dana perimbangan terutama Dana

Alokasi Umum (DAU) sangat signifikan untuk membiayai belanja daerah khususnya belanja yang menyediakan pelayanan publik yaitu belanja modal (Huda & Sumiati, 2019).

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data yang diperoleh serta pembahasan dari hasil penelitian, maka kesimpulan yang diperoleh peneliti adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota Provinsi Kalimantan Barat. Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota Provinsi Kalimantan Barat. Pendapatan Asli daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) secara simultan berpengaruh terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota Provinsi Kalimantan Barat.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustian, D. R., Ismatullah, I., & Iswanto, D. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal Pada Pemerintah Kota Sukabumi. *Jurnal Akuntansi UMMI*, Volume 1(No 1), 101–111. <https://jurnal.ummi.ac.id/index.php/jammi/article/view/953>
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia*. (n.d.). e-ppid.bpk.go.id
- Fahrezi, F., Hasanah, N., & Ulupui, I. G. K. A. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Terhadap Belanja Modal. *Jurnal Akuntansi, Perpajakan Dan Auditing*, 1(2), 141–157.
- Huda, S., & Sumiati, A. (2019). Pengaruh Pad, Dau, Dan Dak Terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah. *Jurnal Wahana Akuntansi*, 14(1), 85–100. <https://doi.org/10.21009/wahana.14.016>
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*. (2006). Indonesia, Kementerian Dalam Negeri.
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*. (2019). Indonesia, Pemerintah Pusat. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/103888/pp-no-12-tahun-2019>
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*. (2010). Indonesia, Pemerintah Pusat. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5095/pp-no-71-tahun-2010>

- Rizal, Y., & Erpita. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal di Kota Langsa. *Jurnal Samudra Ekonomika*, 3(1), 74–83.
- Sujarweni, V. W. (2015). *Metodologi Penelitian Bisnis & Ekonomi*. Pustaka Baru Press.
- Sulistyawati, A. I., & Purwanti, N. S. (2021). PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA PERIMBANGAN DAN BELANJA PEGAWAI TERHADAP BELANJA MODAL (Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur). *Analisis*, 11(1), 48–67. <https://doi.org/10.37478/als.v11i1.829>
- Suryana. (2018). Pengaruh dana alokasi umum DAU dana alokasi khusus DAK dan pendapatan asli daerah PAD terhadap belanja modal Influence of general allocation fund of DAU special allocation fund of DAK and revenue of indigenous PAD to capital expenditure. *Jurnal Ilmu Manajemen & Bisnis*, 14(2), 85–91.